



Pemetaan Kondisi Sarana Prasarana Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

Mapping the Condition of Infrastructure in Surya Bahari Village, Pakuhaji District, Tangerang Regency

1*) Sarjono Puro, 2) Bernadete Nurmawati, 3) Kiki Maria, 4) Denny Balapadang

^{1,2,3}Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia; ⁴Universitas Tri Sakti Jakarta, Indonesia

Email: ¹ Purosipit@yahoo.co.id, ² benurmawati@gmail.com, ³ kimarch99@gmail.com,

⁴ denny_balapadang@yahoo.com

*Correspondence: Sarjono Puro

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.600

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 03-01-2023

Diterima : 20-01-2023

Diterbitkan : 07-02-2023

Masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dengan luas lautnya seharusnya mendapatkan hidup layak sesuai dengan kondisi ekonomi yang stabil. Pengembangan ekonomi juga turut didukung dengan pengembangan sarana prasarana masyarakat secara merata untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Perlunya pemetaan kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh guna mendukung penataan Kawasan untuk memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan, keandalan bangunan dan lingkungan. Perkiraan masa depan, kebutuhan lahan untuk fasilitas perumahan, perekonomian, fasum dan ruang terbuka hijau secara umum kebutuhan akan lahan relatif tersedia. Isu strategis, memungkinkan semakin banyak aktivitas produktif yang dapat dilakukan oleh penduduk dengan terbukanya suatu kawasan dengan terbangunnya pelabuhan yang lebih potensial untuk tetap sebagai pelabuhan perikanan, namun dikembangkan secara terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Metodologi pengambilan data terbagi atas dua metode yakni data primer dan data sekunder Data primer dalam pemetaan kondisi sarana prasarana melalui survei langsung di lapangan (pengamatan langsung, kuisisioner, dan wawancara) di Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji. Pengambilan data sekunder dilakukan untuk hal-hal terkait kebijakan instansi pemerintah terkait dan data penduduk. Kondisi sarana prasarana permukiman di Desa Surya Bahari secara umum masih jauh dari kelayakan sebuah permukiman, harus dilakukan peningkatan kondisi, perbaikan, konstruksi baru jaringan jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, yang ada di Desa Surya Bahari.

Kata Kunci: Pemetaan; Kondisi Lingkungan; Sarana Prasarana; Konstruksi

ABSTRACT

The coastal communities of Tangerang Regency with its vast sea area should be able to live a decent life in accordance with stable economic conditions. Economic development should also be supported by the development of community infrastructure in an equitable manner to reduce disparities between regions. The need to map the environmental conditions of slum areas to support the arrangement of the area to meet the requirements of safety, health, comfort, reliability of buildings and the environment. Future forecasts, land needs for housing facilities, the economy, public facilities and green open spaces in general, the need for land is relatively available. Strategic issues, allowing more productive activities that can be carried out by residents with the opening of an area with the development of a port that has more potential to remain as a fishing port, but developed in an integrated manner with tourism areas. Data collection methodology is divided into two methods, namely primary data and

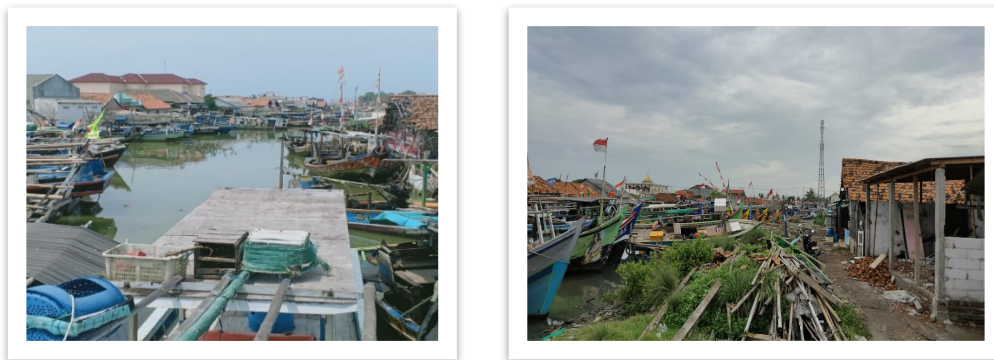
secondary data. Primary data in mapping the condition of infrastructure facilities through direct field surveys (direct observation, questionnaires, and interviews) in Surya Bahari Village, Pakuhaji District. Secondary data was collected for matters related to relevant government agency policies and population data. The condition of settlement infrastructure facilities in Surya Bahari Village in general is still far from the feasibility of a settlement, conditions must be improved, repairs, new construction of road networks, drainage, sanitation, drinking water, waste, in Surya Bahari Village.

Keywords: *Mapping; Environmental Conditions; Infrastructure; Construction*

PENDAHULUAN

Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dicanangkan Daerah Kabupaten Tangerang diungkapkan bahwa guna meningkatkan taraf perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan (Hayat & Napilah, 2022). Masyarakat pesisir pantai Kabupaten Tangerang dengan luas lautnya seharusnya mendapatkan hidup layak dengan kondisi perekonomian yang stabil (Fadli & Nurlukman, 2018). Pengembangan ekonomi juga turut didukung dengan pengembangan sarana prasarana masyarakat secara merata untuk menguangi kesenjangan antar wilayah (Kasman et al., 2022). Berdasarkan BPPS Provinsi Banten 2018 dalam (Rangraeni, 2021), sebaran penduduk miskin di Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang mencapai 33,57% dari total penduduk miskin. Salah satu penggerak perekonomian pesisir dengan adanya obyek wisata mangrove dan sentra budidaya ikan/tambak (Putra, 2016) yang meliputi empat desa yang menjadi sasaran dalam penataan wilayah yaitu: Desa Margamulya, Kronjo, dan Cituis yang merujuk ke Desa Ketapang. Dalam pengembangan pada penataan desa akan dilakukan secara bertahap dengan menyasar wilayah-wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Tangerang. Pada kawasan pesisir bangunan perumahan berdiri sepanjang jalan atau pola linier yang berdiri pada daerah yang terlarang seperti bantaran sungai seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 (a dan b).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025 terutama wilayah miskin dan cenderung kumuh (Sadono, 2018). Kondisi saat ini Perumahan di Kabupaten Tangerang terdiri dari perumahan berkonstruksi permanen, dan bukan permanen yang umumnya keadaan sanitasi lingkungannya kurang terjaga sehingga terkesan kumuh (Marthalina, 2018). Berdasarkan info Tangerangonline (28 Juni 2019) muara Sungai Cituis tidak berfungsi optimal sebagai akses menuju laut sehingga perlu normalisasi muara sungai Cituis di Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji, karena masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Daerah Muara Sungai Cituis berkembang semakin padat karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi sehingga sarana pelayanan dasar (Kilwouw & Agraria, 2017) termasuk prasarana fisik terbatas, kondisi lingkungan yang kurang terawat tidak memenuhi syarat kesehatan, air bersih dan sanitasi jauh dari memadai, kondisi perumahan umumnya jauh dari layak huni, dan pendapatan masih rendah.



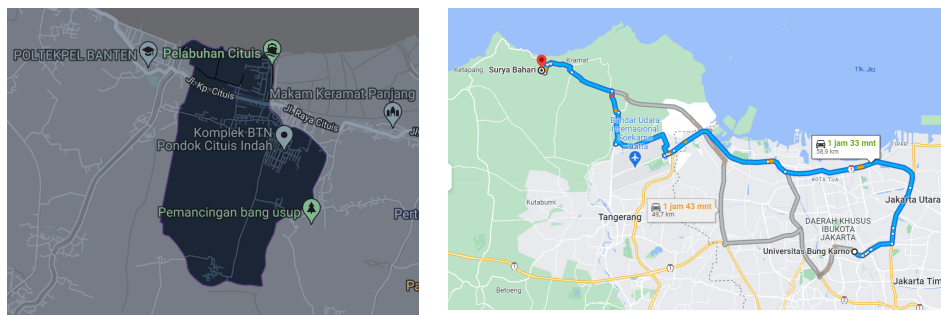
(a) (b)
Gambar 1 Situasi di Muara Kawaan Cituis

Perlunya pemetaan kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh guna mendukung penataan Kawasan untuk memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan, keandalan bangunan dan lingkungan (Gobel, 2019). Dalam (Ikhwan, 2019) apabila kawasan permukiman kumuh tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kawasan kumuh semakin meluas, yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, peningkatan potensi kerawanan dan konflik sosial, penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan sarana prasarana permukiman. Pemerintahan berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tanpa terkecuali dan menangani permasalahan kawasan kumuh di daerahnya (Ponto et al., 2022). Menurut (As' ari & Fadjarajani, 2018) salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh seperti peremajaan sarana dan prasarana lingkungan. Menurut perhitungan ke depan, kebutuhan lahan untuk fasilitas perumahan, ekonomi, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau akan relatif tersedia. Isu strategis, memungkinkan semakin banyak aktivitas produktif yang dapat dilakukan oleh penduduk dengan terbukanya suatu kawasan dengan terbangunnya pelabuhan yang representative yang lebih potensial untuk tetap sebagai pelabuhan perikanan, namun dikembangkan secara terintegrasi dengan kawasan pariwisata.

METODE

Lokasi

Lokasi Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Lokasi dan jarak tempuh dari Kampus Universitas Bung Karno Jakarta ditunjukkan pada Gambar 2



Gambar 2 Peta Lokasi dan Jarak Ke Desa Surya Bahari

Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengambilan data terbagi atas dua metode yakni data primer dan data sekunder (Tan, 2021). Data primer dalam pemetaan kondisi sarana prasarana melalui survei langsung di lapangan (pengamatan langsung, kuisisioner, dan wawancara) (Ahaliki, 2018) di Desa Surya Bahari Kecamatan Paku Haji. Pengambilan data primer dilakukan untuk mendapatkan data terkini kondisi fisik, sosial, dan ekonomi di Desa Surya Bahari. Pengambilan data sekunder dilakukan untuk hal-hal terkait kebijakan instansi pemerintah terkait dan data penduduk di kawasan Cituis. Pemetaan kondisi sarana prasarana dilakukan dengan survei dan pengumpulan data sesuai dengan kriteria-kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2016 (Arifin, 2022).

Jenis Data yang Diperlukan

Pengumpulan data sekunder dilakukan pada semua dokumen yang terkait Desa Surya Bahari baik pada tingkatan nasional atau lokal. Jenis data dan dokumen terkait ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Dokumen Survei Sekunder

Dokumen	Data yang didapatkan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis nasional/provinsi/Kabupaten/Kota • Pola ruang dan struktur ruang • Rencana per sektor sarana prasarana, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan
Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi(PZ)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tata ruang mencakup status perijinan lahan apakah boleh dibangun atau tidak, intensitas ruang • Koefisien Lantai Bangunan/KLB dan • Sarana dan prasarana yang harus ada di zona tersebut • Status dan luas lahan
Data demografi penduduk dari BPS	<ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai dinamika kependudukan, (ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta jumlah penduduk)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam Perda Kabupaten Tangerang No 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 menekan pada beberapa kegiatan terkait dengan penataan Kawasan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2



Sasaran – Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang




Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana	Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Menyediakan Sarana Air Bersih maysrakat
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemantauan kualitas air, air limbah domestik, udara dan tanah Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk

Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kondisi sarana dan prasarana di Desa Surya Bahari ditunjukkan pada Tabel 3

Tabel 3
Kondisi Sarana dan Prasarana di Desa Surya Bahari

No	Kondisi Yang Ditinjau	Keterangan
1	<p>Keteraturan Ketaruran Bangunan</p> 	<p>a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</p> <p>b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan</p> <p>c. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL</p>
2	<p>Kondisi Bantaran sungai</p> 	<p>a. Terdapat rumah menempati bantaran sungai</p> <p>b. Kedalam sungai sekiat 50 cm</p> <p>c. Ada tumpukan sampah dan lumpur akibat pendangkalan</p> <p>d. Lebar sungai mengecil dari pantai (33 m menjadi 7 meter)</p> <p>e. Tidak ada pemabnat peranhu</p> <p>f. Talud sungai kondisi rusak</p>

No	Kondisi Yang Ditinjau	Keterangan
		g. Tidak ada jalan di bantaran sungai
3	<p>Kondisi Penyediaan Air Minum</p> 	<p>a. Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa</p> <p>b. Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari</p>
4	<p>Pengelolaan Air Limbah</p> 	<p>c. Tidak memiliki Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat jadi limbah masuk ke sungai langsung</p>
5	<p>Kondisi Jalan Lingkungan</p> 	<p>a. Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis</p> <p>b. Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman</p>

No	Kondisi Yang Ditinjau	Keterangan
6	Kondisi Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air, b. Sering terjadi genangan c. Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal d. Kondisi drainase dari rumah menuju ke kali cituis sangat buruk (kondisi banyak sampah dan air tidak mengalir) e. Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan f. Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman
7	Pengelolaan Persampahan 	<p>Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)
8	Kondisi Pasar Surya Bahari 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan tidak dipergunakan sesuai fungsinya sebagai pasar b. Bagian depan / halaman sering tergenang c. Struktur bangunan (lantai, dinding, atap dll) kondisi rusak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi jaringan jalan lingkungan permukiman cukup sempit dan hanya bisa dilalui sepeda motor dengan lebar sekitar 80 cm. Kondisi jalan lingkungan di kawasan tersebut sebagian jalan sudah disemen dan beraspal, namun kondisinya 60% rusak. Aktifitas MCK warga masih dilakukan di sungai, beberapa rumah juga memiliki sarana MCK namun limbahnya langsung dibuang ke sungai atau ke saluran drainase karena tidak adanya instalasi pengolahan limbah (IPAL). Ada beberapa selokan

yang ditutup secara permanen, terutama di depan rumah warga, sehingga tidak ada jalur untuk pemeliharaan. Secara umum, kondisi prasarana permukiman Desa Surya Bahari jauh dari layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahaliki, B. (2018). Sistem Informasi Geografis (SIG) Analisis Metode Saw Dalam Pemetaan Lokasi Sarana Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Gorontalo Berbasis Web Sig. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 3(1), 18.
- Arifin, C. (2022). *Evaluasi Program Kotaku dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare*. Universitas Bosowa.
- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1.
- Gobel, F. (2019). Konsep Penataan Kawasan Permukiman Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato. *Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering*, 2(2), 31–45.
- Hayat, N., & Napilah, S. N. (2022). Dampak Pembangunan Gerbang Mapan pada Perilaku Sosial Masyarakat Desa Ketapang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8800–8810.
- Ikhwan, M. U. H. (2019). *Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan*. Universitas Bosowa.
- Kasman, K., Mursa, T. K., & Purbani, D. (2022). Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Budidaya Tambak di Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kelautan Nasional*, 17(1), 71–82.
- Kilwouw, A. N., & Agraria, H. (2017). *Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara*.
- Marthalina, M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–24.
- Ponto, G. D., Pangemanan, S. E., & Kasenda, V. (2022). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur). *GOVERNANCE*, 2(1).
- Putra, K. E. (2016). *Perencanaan Kawasan Pesisir Sebagai Kawasan Cepat Tumbuh di Kota Medan*.

^{1*) Sarjono Puro,} ^{2) Bernadete Nurmawati,} ^{3) Kiki Maria,} ^{4) Denny Balapadang}
Mapping the Condition of Infrastructure in Surya Bahari Village, Pakuhaji District, Tangerang Regency

Jurnal ArchiGreen, 3(5), 54–60.

Rangraeni, N. P. (2021). *Analisis Sektor Unggulan dalam Perekonomian Kabupaten Tangerang 2015-2019*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sadono, E. D. (2018). Desentralisasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia Studi Pada Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kawistara, 7(3), 249–264.*

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.*



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).